

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI SAYUR OLEH
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS KELURAHAN
MAHARATU OLEH DINAS PERTANIAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Srata Satubidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



FIFI TRI YULI ASTUTI

NPM : 167310727

**PROGRAM STUDI IMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Fifi Tri Yuli Astuti
NPM : 167310727
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh
Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kelurahan
Maharatu Oleh Dinas Pertanian)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub bab dalam usulan penelitian ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan metoda penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian Skripsi.

Pekanbaru, 9 Maret 2022

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Fifi Tri Yuli Astuti
NPM : 167310727
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kelurahan Maharatu Oleh Dinas Pertanian)

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi syarat ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 9 Maret 2022

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M. Si

Dita Fisdian Adni, S.IP.,M.IP

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggota,

Indra Safri, S.Sos., M. Si

Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

N a m a : Fifi Tri Yuli Astuti
NPM : 167310727
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kelurahan Maharatu Oleh Dinas Pertanian)

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 9 Maret 2022

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP M. Si

Dita Fisdian Adni, S.IP.,M.IP

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Indra Safri, S.Sos., M. Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP M. Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb,

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur kehadiran Allah SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Pemberdayaan masyarakat Petani Sayur Oleh Lurah, di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru “. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis menjadi salah satu mahasiswa Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah bersedia memberikan bantuan dalam pemilihan

judul usulan penelitian ini sehingga layak diangkat sebagai suatu karya ilmiah;

4. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP.,M.Si sebagai pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa Orang Tua Penulis Bapak Suristo dan Ibu Sumini yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini;
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 Kelas I, kemudian Devi Nofrianti, Pratiwi Agustina dan Sari Indah Permata yang telah memberikan saran, motivasi dan semangat kepada penulis.

Penulis juga mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan keridhoan dari Allah SWT, *amin yaa Robbal'alamin*.

Pekanbaru, 9 Maret 2022

Penulis,

Fifi Tri Yuli Astuti

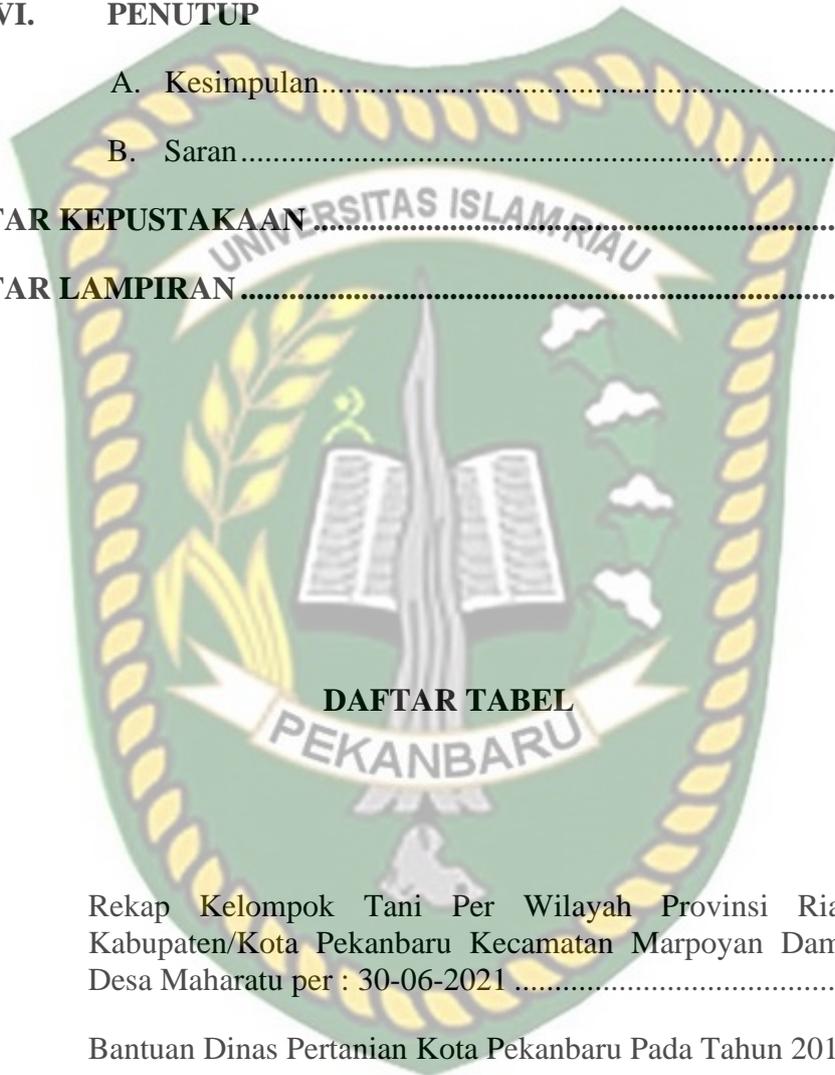


DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFRENHENSIF SKRIPSI.....	iv
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL	vi
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1

	B. Perumusan Masalah.....	14
	C. Tujuan Penelitian.....	15
	D. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II.	STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
	A. Studi Kepustakaan.....	16
	B. Penelitian Terdahulu.....	33
	C. Kerangka Pikiran.....	34
	D. Konsep Operasional	35
	E. Operasional Variable	37
BAB III.	METODE PENELITIAN	
	A. Tipe Penelitian.....	38
	B. Lokasi Penelitian	38
	C. Informan Penelitian	39
	D. Jenis dan Sumber Data	40
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
	F. Teknik Analisis Data.....	41
	G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	43
BAB IV.	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai	44
BAB V.	HASIL PENELITIAN DAN SARAN	
	A. Identitas Responden	47
	B. Hasil Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus, Kelurahan Maharatu Oleh Dinas Pertanian). .	50

C.	Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Proses Upaya Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus, Kelurahan Maharatu Oleh Dinas Pertanian)	57
 BAB VI. PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN		63
DAFTAR LAMPIRAN.....		66



Tabel		Halaman
I.1.	Rekap Kelompok Tani Per Wilayah Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai Desa Maharatu per : 30-06-2021	12
I.2.	Bantuan Dinas Pertanian Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018	14
II.1.	Penelitian Terdahulu	33
II.2.	Operasional Variabel Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Lurah di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	37
III.1.	Informan dan Key Informan Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Lurah di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	39

III.2.	Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Lurah di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	43
--------	--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1.	Kerangka Pikir Tentang Pemberdayaan Masyarakat Petani Oleh Lurah di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	34



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fifi Tri Yuli Astuti

NPM : 167310727

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Penelitian : Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kelurahan Maharatu Oleh Dinas Pertanian)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
 2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
 3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.
- Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 4 Maret 2022

Pelaku Pernyataan,

Fifi Tri Yuli Astuti

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI SAYUR OLEH
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS KELURAHAN
MAHARATU OLEH DINAS PERTANIAN)**

ABSTRAK

Fifi Tri Yuli Astuti

Petani sebagai pengelola usaha taninya pasti memiliki perilaku kerja dalam menjalankan dan mengembangkan usaha taninya. Seperti petani sayur yang berada di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Petani-petani sayur tersebut tetap bekerja sebagai seorang petani walaupun saat ini banyak para pekerja di sektor pertanian yang beralih pada pekerjaan lain yang lebih menjamin untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Dari kondisi

tersebut penulis ingin melihat bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Lurah di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Dari masalah diatas penulis dapat merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana Strategi Pemerintah Kelurahan Maharatu untuk memberdayakan petani sayur yang ada di Kelurahan Maharatu Marpoyan Damai. Tipe penelitian ini bersifat kualitatif yang dilakukan di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai, , teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori Pemberdayaan yang memiliki tiga Indikator, yakni: 1.pengembangan,2.Penguatan,3.Perlindungan. Adapun Hasil yang diperoleh dari Penelitian ini adalah Pemberdayaan Yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Pekanbaru Belum Maksimal.

Kata Kunci : Pemberdayaan,Petani Sayur.

**COMMUNITY EMPOWERMENT OF VEGETABLE FARMERS BY
PEKANBARU CITY GOVERNMENT (CASE STUDY OF MAHARATU
KELURAND BY AGRICULTURE DEPARTMENT)**

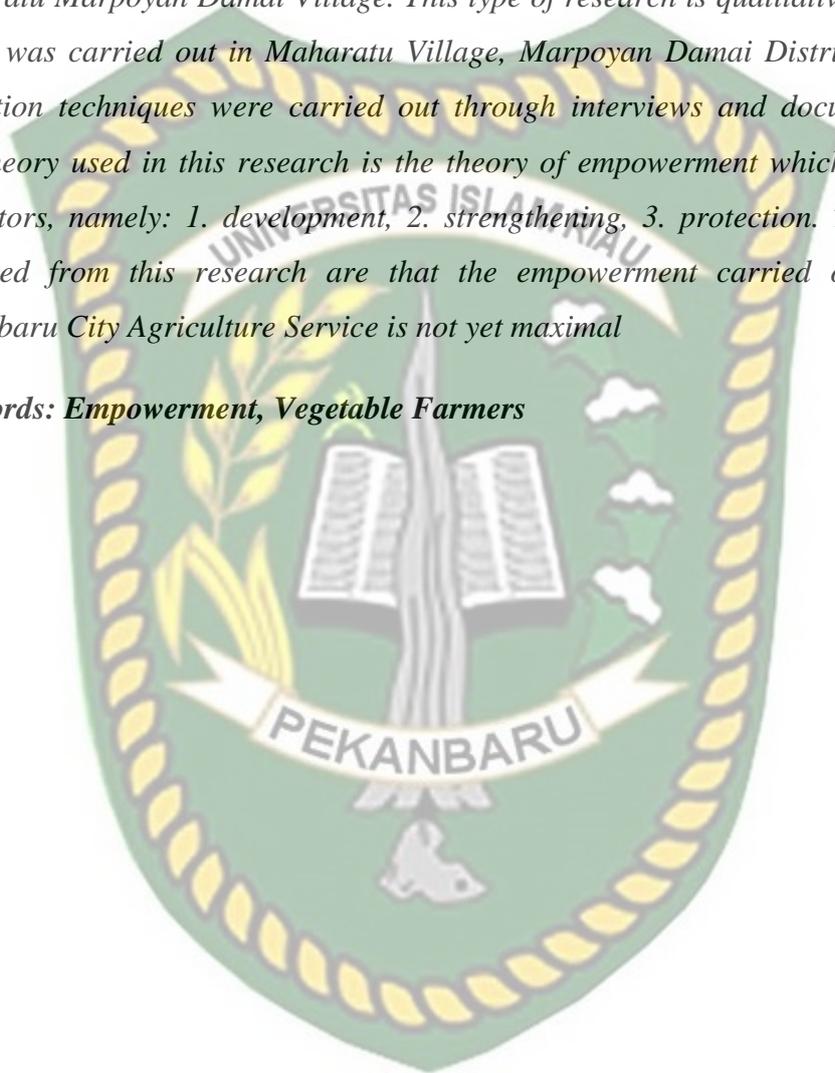
ABSTRACT

Fifi Tri Yuli Astuti

Farmers as managers of their farms must have work behavior in running and developing their farming business. Such as vegetable farmers who are in Maharatu Village, Marpoyan Damai District, Pekanbaru City. These vegetable farmers continue to work as farmers, although currently many workers in the agricultural sector are switching to other, more secure jobs to earn higher incomes. From this condition, the writer wants to see how the Community Empowerment of Vegetable Farmers by the Village Head in Maharatu Village,

Marpoyan Damai District, Pekanbaru City. From the problem above, the writer can formulate the formulation of the problem in this research, namely How the Maharatu Village Government Strategy to empower vegetable farmers in Maharatu Marpoyan Damai Village. This type of research is qualitative in nature which was carried out in Maharatu Village, Marpoyan Damai District, , , data collection techniques were carried out through interviews and documentation. The theory used in this research is the theory of empowerment which has three indicators, namely: 1. development, 2. strengthening, 3. protection. The results obtained from this research are that the empowerment carried out by the Pekanbaru City Agriculture Service is not yet maximal

Keywords: Empowerment, Vegetable Farmers



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Negara kesatuan republik indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia, hal itu tercantum di dalam pembukaan undang undang dasar Negara republic indonesia 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah, serta dibagilah wilayah indonesia itu menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ini sudah disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) undang undang dasar Negara republic indonesia tahun 1945 yang menyatakan “Negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang undang”. Dan dalam pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Di indonesia ada yang namanya pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah

kabupaten/kota. Sedangkan pembagian wilayah Negara dibagi atas 2 dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yaitu :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota.
- (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Dalam pasal 12 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- f. Sosial

Urusan pemerintahan yang wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota:

- a. Tenaga Kerja
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Pangan
- d. Pertahanan
- e. Lingkungan Hidup

- f. Administrasi Pendudukan dan Catatan Sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan Informatika
- k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- l. Penanaman
- m. Penanaman Modal Usaha
- n. Kepemudaan dan Olahraga
- o. Statistik
- p. Persandian
- q. Kebudayaan
- r. Perpustakaan
- s. Kearsipan

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki perkembangan kebudayaan dan adat istiadat yang baik adalah Provinsi Riau. Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “*Rio*”, yang artinya sungai. Riau dirujuk hanya ke wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawah Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah *Residentie Riouw* pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang dan Riouw oleh masyarakat lokal dieja menjadi Riau.

Riau merupakan penggabungan dari kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga

(1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis. Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat Nomor 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun waktu 6 tahun 17 November 1952 s / d 5 Maret 1958) (Riau.go.id).

Marpoyan Damai adalah sebuah kecamatan di [Kota Pekanbaru](#), [Riau](#), [Indonesia](#). Kecamatan ini memiliki luas wilayah 29,74 km². Kecamatan ini memiliki penduduk sebanyak 116.536 jiwa dengan kepadatan 3919 jiwa/km². Kecamatan ini memiliki kode wilayah 14.71.09.^[1] Kecamatan ini memiliki lima kelurahan.

Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru merupakan pemakaran dari Kelurahan induk yakni sebagian dari Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan, berdasarkan Peraturan Daerah no 4 tahun 2003.

Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Dalam rangka prmbangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dialokasikan anggaran untuk Kelurahan di daerah kota yang tidak ada desanya paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang

memiliki desa, alokasi anggarannya paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 25 :

- (1) Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin oleh lurah.
- (2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.
- (3) Tugas lurah meliputi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta dalam Pemberdayaan, Pendampingan Masyarakat kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan dijelaskan dalam pasal 27:

- (1) Pemberdayaan dan pemdampingan masyarakat kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- (2) Lembaga kemasyarakatan kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan kelurahan diatur dengan Peraturan Menteri. Menurut Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 1 dan 2. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru merupakan pemekaran dari Kelurahan induk yakni sebagian dari Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan, berdasarkan peraturan daerah no 4 tahun 2003 .

Pembangunan jangka panjang dalam bidang ekonomi saat ini diharapkan dapat mencapai struktur ekonomi yang seimbang dengan kemampuan dan kekuatan industri yang maju serta didukung oleh kekuatan dan kemampuan

pertanian yang tangguh. Sektor pertanian dalam pembangunan berperan sangat penting baik dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, terpenuhinya kebutuhan rakyat akan pangan, meningkatkan daya beli rakyat, serta meningkatnya kemampuan penyediaan bahan mentah untuk pengembangan industri.

1. TUGAS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

Tugas Balai Penyuluhan Pertanian adalah:

- Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota;
- Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
- Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh (PNS, Swadaya, Swasta) melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- Melaksanakan proses pembelajaran melalui unit percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

2. INDIKATOR KEBERHASILAN FASILITASI BPP

Indikator keberhasilan fasilitasi BPP adalah:

- Peningkatan kelas klasifikasi BPP
- Penambahan jumlah PP swadaya dan PP Swasta

- Dihasilkan matrik perencanaan pendampingan penyuluhan tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan melalui rembug tani
- Peningkatan kelas kemampuan kelembagaan petani
- Peningkatan produksi dari target yang ditetapkan oleh masing-masing penyuluh
- Pelaksanaan demplot yang diikuti oleh adopsi teknologi anjuran oleh petani
- Jumlah penyuluh yang melakukan evaluasi kinerja
- Jumlah kelembagaan petani yang melakukan jejaring dan kemitraan.

3. PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA OLEH BPP

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang ada di wilayah kerja balai.
- Memetakan kondisi nyata kelembagaan yang ada di wilayah kerja balai meliputi: tingkat kemampuan manajemen, permodalan, skala usaha dan kemitraan yang dilakukan.
- Menyusun rencana pemberdayaan dan penguatan kelembagaan.

4. UPAYA PEMBERDAYAAN OLEH BPP

Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh BPP adalah srbagai berikut:

- Latihan dan Kunjungan (LAKU);

- Permagangan;
- Studi banding;
- Mengembangkan jejaring kerjasama/kemitraan;
- Melakukan pelayanan konsultasi agribisnis;
- Mengembangkan inkubator agribisnis.

5. UPAYA PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

Upaya penguatan dalam rangka pelaksanaan tugas BPP antara lain:

1. BPP sebagai pusat data dan informasi (SIMLUH, Siluhtan, E-VALUH, dll) : pemenuhan fasilitas brainware, software, dan hardware.
2. Peningkatan kapasitas SDM (penyuluh, petugas dan petani) melalui pelatihan, magang, lokakarya, temu teknis, studi banding, cyber extension, dan percontohan oleh lembaga Pemerintah dan Swasta.
3. BPP sebagai pusat koordinasi program pembangunan pertanian: BPTP, Instansi Teknis, Kantor Kecamatan
4. BPP sebagai pusat pengembangan kemitraan: Perbankan, Pasar , Bulog, dan perusahaan agribisnis
5. BPP memenuhi target penumbuh- kembangan kelembagaan ekonomi petani (KEP/Korporasi) 1 KEP 1 WKBPP: melakukan pendampingan
6. PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI

Dasar hukum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani adalah:

- UUD 1945 Ps.33,
- UU No.16 Ps 19 (2), UU No.19/2013,
- Ps 69, Ps 80 (2)
- Peraturan Kepala BPSDMP Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan KEP
- Peraturan Kepala BPSDMP Tahun 2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan KEP Berbasis Agroindustri

Mengapa perlu didorong penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani?

1. Upaya terobosan pemberdayaan petani untuk mengembangkan usaha yang dikelola secara profesional di sektor pertanian.
2. Sebagai upaya penguatan manajemen organisasi dan usaha produktif kelompok tani sehingga berorientasi usaha produktif, memiliki kekuatan hukum dan akses terhadap sumber informasi, teknologi, pembiayaan maupun pasar.
3. Meningkatkan skala usaha/ekonomi, efisiensi usaha dan posisi tawar.

Kelembagaan ekonomi petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, terdiri dari seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB), LKMA, UPJA Alsintan, koperasi, BUMP, dan Perseroan Terbatas.

Petani sebagai pengelola usaha taninya pasti memiliki perilaku kerja dalam menjalankan dan mengembangkan usaha taninya. Seperti petani sayur yang berada di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Petani-petani sayur tersebut tetap bekerja sebagai seorang petani walaupun saat ini banyak para pekerja di sektor pertanian yang beralih pada pekerjaan lain yang lebih menjamin untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Petani-petani sayur tersebut tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Keberhasilan kerja yang akan ditampakkan seorang pekerja sangat tergantung dari perilaku kerja seseorang tersebut dalam melaksanakan pekerjaan dalam segala aspek kehidupannya. Keberhasilan di berbagai wilayah kehidupan ternyata ditentukan oleh perilaku manusia, terutama perilaku kerja.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12) Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Dan pemberdayaan masyarakat mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa Implementasi Undang-undang

Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. Undang-undang Desa lebih pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memposisikan masyarakat desa sebagai subyek (pelaku utama) dan tidak hanya sekedar obyek (sasaran) saja. Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), maka mampu membangkitkan kemampuan self-help untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju.

Table 1.1 : Rekap Kelompok Tani Per Wilayah Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai Desa Maharatu per : 30-06-2021

No	Nama Kelompok Tani	Total Jumlah Anggota	Jumlah Anggota sudah diisi NIK	Jumlah anggota memiliki lahan kurang dari 1 ha	Jumlah anggota memiliki lahan kurang dari 1-2 ha	Jumlah Anggota memiliki lahan lebih dari 2 ha
1.	Maharatu Maju	22	22	22	0	0
2.	Mustang II	15	15	15	0	0
3.	Suka Makmur I	15	15	15	0	0
4.	Mustang I	33	33	33	0	0
5.	Mekar Jaya	8	8	8	0	0
6.	Mustang III	21	21	21	0	0

7.	Suka Makmur II	11	11	11	0	0
8.	Tani Maju	15	15	15	0	0
9.	KWT Nurasih Bertuah	47	47	47	0	0
10.	KWT Pahlawan	25	25	25	0	0
	Jumlah	212	212	212	0	0

Sumber : *Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian 2021*

Sehingga tercapai desa yang maju, mandiri dan masyarakatnya sejahtera lahir maupun batin sesuai harkat martabatnya. Pengalaman yang baik dari program pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Undang-undang Desa yaitu meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi. Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata. Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan pihak lain. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat.

Dinas Pertanian Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018 memberi bantuan berupa benih bayam, benih kangkung, benih seledri, bibit jagung, Pupuk dan Racun Kepada Kelompok Tani Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Adapun jumlah bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 : Bantuan Dinas Pertanian Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018

No	Jenis Bantuan	Jumlah
1.	Benih bayam	300 Bungkus
2.	Benih kangkung	210 Bungkus
3.	Benih seledri	300 Bungkus
4.	Bibit jagung	100 Bungkus
5.	Pupuk	500 Kg
6.	Racun	1000 Liter

Adapun fenomena yang terjadi di Kelurahan Maharatu :

1. Kurang perhatian terutama pada bantuan sarana dan prasarana yang digunakan petani untuk bertani sayur
2. Semakin berkurangnya lahan pertanian sayur yang telah berubah menjadi fungsi menjadi bangunan permanen

Maka dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Bagaimana Strategi Pemerintah Kelurahan Maharatu untuk memberdayakan petani sayur yang ada di Kelurahan Maharatu Marpoyan Damai”.

B. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memberdayakan petani sayur yang ada di Kelurahan Maharatu Marpoyan Damai”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui Bagaimana Strategi Pemerintah Kelurahan Maharatu untuk memberdayakan petani sayur yang ada di Kelurahan Maharatu Marpoyan Damai
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung bagi Pemerintah Kelurahan Maharatu untuk memberdayakan petani sayur yang ada di Kelurahan Maharatu Marpoyan Damai

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian
 - a. Teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna untuk melengkapi dan mengembangkan Ilmu Pemerintahan.
 - b. Akademis, diharapkan sebagai bahan studi perbandingan dan juga bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang lainnya khususnya yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
 - c. Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi kelurahan maharatu kota Pekanbaru dalam melakukan pemberdayaan terhadap petani.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa teori untuk dijadikan landasan teori yang penulis anggap relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini :

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Dari beberapa Negara, antara pemerintahan dan pemerintahan pemerintahan tidak di bedakan, dalam bahasa Inggris disebut *Government*, Perancis *Government*, dan dalam bahasa Arab disebut *Hukumat*. Negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah (Ndraha,2010:4).

Konsep pemerintah (government) adalah gejala social, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, maupun antar individu dengan kelompok (Ndraha,2010:6). Kemudian yang disebut pemerintah adalah organ berwenang pelayanan publiK dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah,sehingga setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia wajib melayankannya (Ndaraha,2003:7).

Dari penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi ,menjadi 3 fungsi, yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Lebih lanjut lagi yang dikatakan ilmu pemerintahan adalah melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan di perintah memiliki kepatuhan keharusan (Syafiee,2003:4).

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahan di wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah seperti penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, di dalamnya melaksanakan pemerintahannya, pemerintah pusat dibantu oleh daerah sehingga masalah-masalah pemerintahannya, pemerintah pusat dibantu oleh daerah sehingga masalah-masalah pemerintahan hanya terbeban oleh pemerintah pusat saja.

Menurut Muhammad Hatta, pembentukan pemerintahan daerah (pemerintah oleh pemerintah yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Menurut dasar kedaulatan rakyat, hak rakyat menentukan nasibnya hanya pada pucuk pimpinan negeri, tetapi juga setiap tempat di kota, desa, dan daerah (Rosidin, 2010:39).

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Undang-Undang No.23 Tahun 2014).

2. Konsep Pemerintah

Woodrow Wilson *dalam* Syafiee (2013:10) Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkata bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kelompok masyarakat.

Kemudian menurut Ndraha (2011: 6) mengatakan bahwa pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia maka berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Dalam Maulidiah (2014;4) pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah tersebut yakni

memberikan pelayanan kepada masyarakat (service) memberdayakan segala potensi yang dimiliki (empowerment) serta melaksanakan pembangunan (development).

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen menurut G.R. Terry dalam buku *Principle of Management* adalah proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya (Permadi, 2010:3).

Stoner dan Freeman, manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pimpinan dan pengendalian, supaya organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Sunyoto, 2012:3).

Suryadinata (1998) memandang manajemen pemerintah suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses pergerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi keparamong prajaan. Talizidhuhu Ndraha (2003:158) mendefinisikan manajemen pemerintahan terlihat melalui ruang materi pokok kurikulumnya:

1. Asas dan sistem Pemerintahan
2. Hukum tata negara
3. Ekologi Pemerintahan

4. filsafat etika pemerintahan
5. Praktik penyelenggara pemerintahan

Berdasarkan uraian para ahli di atas dapat disimpulkan manajemen bahwa manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Konsep Kelurahan

Dalam pasal 1 : 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Sedangkan, perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala lingkungan yang dalam susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (C.S.T. Kansil, 2002: 12).

Kepala Kelurahan (Lurah) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur dengan syarat yaitu pendidikan minimal sekolah lanjutan pertama atau yang berpengalaman/berpengalaman sederajat dengan itu. Sekretaris Kelurahan adalah unsur staf yang membentuk usaha kelurahan dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan kelurahan. Sekretaris kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala urusan. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan di kelurahan maka dapat dibentuk lingkungan yang dikepalai oleh kepala lingkungan. Kepala kelurahan sebagai pemegang utama dibidang pembangunan maka ia juga dapat dibantu oleh

satu lembaga masyarakat yang dulunya dikenal dengan LKMD kini berubah menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu mitra pemerintah kelurahan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (A.W. Wijaya).

5. Konsep Pemerintah Kelurahan

Pemerintahan dan pemerintah mempunyai arti sempit dan luas, Pemerintah dalam arti luas adalah segala tugas dan kewenangan Negara, yang kalau mengikuti pembagian menurut Montesquieu, Pemerintah dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit menunjukkan kepada seluruh aparat atau perlengkapan negara yang menjalankan tugas dan kewenangan dibidang eksekutif saja.

Inu Kencana Syafii (2005 : 11), memberikan pengertian sebagai berikut :

- a. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh.
- b. Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan pemerintah.
- c. Pemerintah berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Secara Etimologis, kata pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

1. Mendapat awalan "pe" menjadi kata "perintah" berarti badan atau organelit yang melakukan pekerjaan mengurus Negara.
2. Mendapat akhiran "an" menjadi kata "pemerintahan" berarti perihal, cara atau perbuatan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Didalam kata

dasar "perintah" paling sedikit ada empat (4) unsur penting yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak diperintah yang disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah yang memiliki wewenang dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Hak diperintah memiliki kekuasaan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang memerintah dan diperintah terdapat hubungan timbalbalik secara vertikal maupun horizontal.

Menurut Mac Iver *dalam* Inu Kencana Syafii (2005:6) mengatakan bahwa maksudnya pemerintah itu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai Pemerintahan dan Pemerintah maka perlu dilakukan penghayatan yang lebih mendalam.

Dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan "*government*" yang sering diartikan sebagai "Pemerintah" ataupun "Pemerintahan. Namun dari pengertian di atas kita tidak boleh salah memilih dan menerjemahkan kata "*government*". Kita harus mengambil pengertian yang cocok atau yang tepat untuk menterjemahkan kata "*government*" sesuai dengan pengertian yang ada. Menurut W. S. Syare *dalam* Inu Kencana Syafii (2005:5) mengemukakan maksudnya pemerintah dalam defnisi terbaiknya adalah organisasi dari negara yang memperlihatkan menjalankan kekuasaannya. Kelurahan sebagai kesatuan wilayah

terkecil didalam wilayah Kecamatan didaerah Kabupaten/Kota, dapat berfungsi sebaga unit kerjapelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangandari Camat kepada Lurah. Sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya,pemerintah kelurahan menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kelurahansesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan Camat.

Pemerintah kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan masyarakat diwilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah dibawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan dasar masyarakat;seperti pelayanan kelengkapan data untuk pembuatan KTP, pencatatan aktatanah, pelayanan keterangan untuk kesehatan, penyuluhan masyarakat, tatapembagian air untuk pertanian (irigasi) dan sebagainya. Pembentukan kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah melalui analisispotensi daerah, beban kerja daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, responsivitas, fleksibilitas, rasionalitas, rentang kendalidan akuntabilitas.

6. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan (empowerment) merupakan konsep yang berkaitandengan kekuasaan (power). Istilah kekuasaan seringkali identic dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang

diinginkanya . kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*) dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan (Djohani,2003). Menurut Rappaport (1984), pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek, sehingga diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang secara mandiri terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kemakmuran dan kesajahteraannya, pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk memberdayakan ekonomi, politik dan sosial masyarakat.

Secara konseptual, pemberdayaan atau penguasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan mengenai kekuasaan (Suharto,2006:57). Lebih lanjut (*dalam* Suharto, 2006 : 58) dijelaskan bahwa kemungkinan terjadi proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.

2. Bahwakekuasaan dapat diperluas yang menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan dapat didefinisikan antarlain sebagai berikut :

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan mana orang menjadi kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembag-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengelokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas kehidupannya (Suharto, 2006: 58-59).

Pemberdayaan harus berlangsung secara terus menerus, komperhensif dan simultan sampai ambang batas keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dengan yang diperintah. Dalam hubungan ini diperlukan berbagai program pemberdayaan yakni:

- 1) Pemberdayaan politik pemerintahan yang bertujuan meningkatkan *bargaining position* yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui *bargaining* tersebut, yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang jasa, layanan, dan kepedulian, tanpa orang lain.

- 2) Pemberdayaan politik ekonomi, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggungjawab pertumbuhan dan pemikulbeban pembangunan.
- 3) Pemberdayaan politik sosialbudaya yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* untuk meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*) dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia
- 4) Pemberdayaan politik lingkungan dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang diperintah dengan lingkungan terdapat hubungan saling menguntungkan (*dalam Ndraha, 2003 :77-78*).

Pemberdayaan masyarakat terutama di desa tidak hanya cukup dengan upaya meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas, dan efisiensi serta memperbaiki empat akses (Widjaja :2003) yaitu :

- 1) Akses terhadap sumberdaya
- 2) Akses terhadap teknologi
- 3) Akses terhadap pasar
- 4) Akses terhadap sumber pembiayaan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi sebagai berikut:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang meningkatkan masyarakat berkembang.

- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat melalui pemberian input dana, pembangunan, prasarana baik berupa fisik maupun sosial.
- 3) Melindungi melalui pemihakan yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan bukan berarti mengisolasi atau dari interaksi.

Menurut Slamet (*dalam* M.Anwas,2012:49) pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupan sendiri. Sedangkan Sedarmayanti (*dalam* Makmur,2008, 53-54) mengartikan pemberdayaan yang pertama, menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuasaan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar berdaya. Kedua menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau pemberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Menurut Muktar Saman (Simunjuntak 2013;73) pemberdayaan masyarakat bermakna suatu upaya untuk mendorong dan merangsang adanya kemandirian, suatu bentuk partisipasi masyarakat tidak akan terbentuk. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabat secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya (Widjaja2002: 169)

Parsons lebih menekankan pemberdayaan adalah proses agar orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai kontrol, dan

mempengaruhi kehidupan. pemberdayaan menekankan bahwa memperoleh keterampilan, pengetahuan, kekuasaan, yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Mardikanto dan Soebianto, 2013; 29).

7. Konsep pemberdayaan masyarakat

Menurut Mubyarto, orang miskin harus diberdayakan, dibangun dari ketidakberdayaan, dan kata kunci bagi mereka adalah keberdayaan, keswadayaan dan kemandirian (Mubyarto, 2006:82). Kemandirian tersebut bukan hanya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, akan tetapi dapat tumbuh dan berkembang dengan kemampuan atau kekuatan sendiri. Memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam kondisi yang tidak mampu agar dapat melepaskan dari kemiskinan dan keterbelakangan (Gunawan, 2006:6). Upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara berikut :

- a. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi (daya) masyarakat pada berkembang. Pemberdayaan itu sendiri berarti upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta mengembangkannya.
- b. memperkuat potensi (daya) yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) dengan langkah-langkah atau cara-cara yang positif dan nyata memberikan input kepada masyarakat, dan membuka akses terhadap sumber daya yang tersedia dengan memberi peluang-peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

- c. memberdayakan masyarakat berarti pula lemah dan harus dilakukan pencengahan agar tidak bertambah lemah (Gunawan , 2006:67-68).

Menurut Friedman (1994) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas bidang ekonomi saja tetapi juga politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) baik secara nasional maupun internasional.

Ginjar Kartasmita (1996:159-160) Menyebutkan tiga aspek pokok yang perlu dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. *Enabling* (Penyadaran)

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat

2. *Empowering* (Penguatan)

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki Masyarakat.

3. *Protecting* (Perlindungan)

Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang.

8. Konsep Peran

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu

peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

9. Konsep partisipasi masyarakat

Menurut Ndraha *dalam* Mustafa (2014;79) partisipasi sebagai pengambilan bagian kegiatan bersama. Kegagalan dalam mencapai hasil dari program pembangunan, tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat masyarakat. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab di antaranya:

- a. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak.
- b. Pembangunan meskipun dimaksud menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami itu.

- c. Pembangunan dimaksud untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaan tidak sesuai dengan pemahaman mereka.
- d. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi sejak semula rakyat diikutsertakan.

Menurut Sugiono (2013;65) mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat antara lain seperti partisipasi masyarakat dengan pemikiran, partisipasi dengan tenaga, partisipasi dengan pikiran dan tenaga atau partisipasi aktif dengan keahlian, partisipasi dengan jasa, barang dan sumbangan lain.

Menurut Siagian (2013;33) partisipasi masyarakat menjadi dua yaitu :

1. Partisipasif pasif yaitu sikap, perilaku, dan tindakan rakyat tidak melakukan hal-hal yang dapat menghalangi kelancaran jalannya roda pembangunan.
2. Partisipasi aktif yaitu:
 - a. Adanya kesadaran masyarakat dan negara yang tinggi dan tidak menyerahkan penentu nasib kepada orang lain serta kepada pemimpin, tokoh masyarakat formal maupun non formal.
 - b. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan berarti mendorong kearah pembangunan yang serasi dan martabat manusia, keadilan sosial sebagai lingkungan hidup manusia.

Menurut Cohen dan Uphoff (*dalam* Mustafa 2014:56) membagi partisipasi dalam tahapan pelaksanaan yang merupakan tahapan terpenting dalam pembangunan. Karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dalam partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi dua

partisipasi dalam bentuk sumbangan materi dan bentuk tindakan program Menurut Colen dan Uphoff (*dalam* Mustafa 2014: 56) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, baik bersifat politis yang menyangkut kepentingan mereka dalam hal bersifat teknis.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi meliputi menggerakkan sumber dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.
3. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan, partisipasi yang mengambil manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaanyang telahdicapai baik berkaitan dengan kualitassegi kuantitas dapat dilihatdari presentasi keberhasilan.
4. Partisipasi dalam menilai pembagunan yaitu ketertiban anggota masyarakat dan menilai sampai mana pelaksanaan pembagunan sesuai dengan perencanaan dan sejauh mana hasil dapat mengetahui kebutuhan masyarakat

B. Penelitian Terdahulu

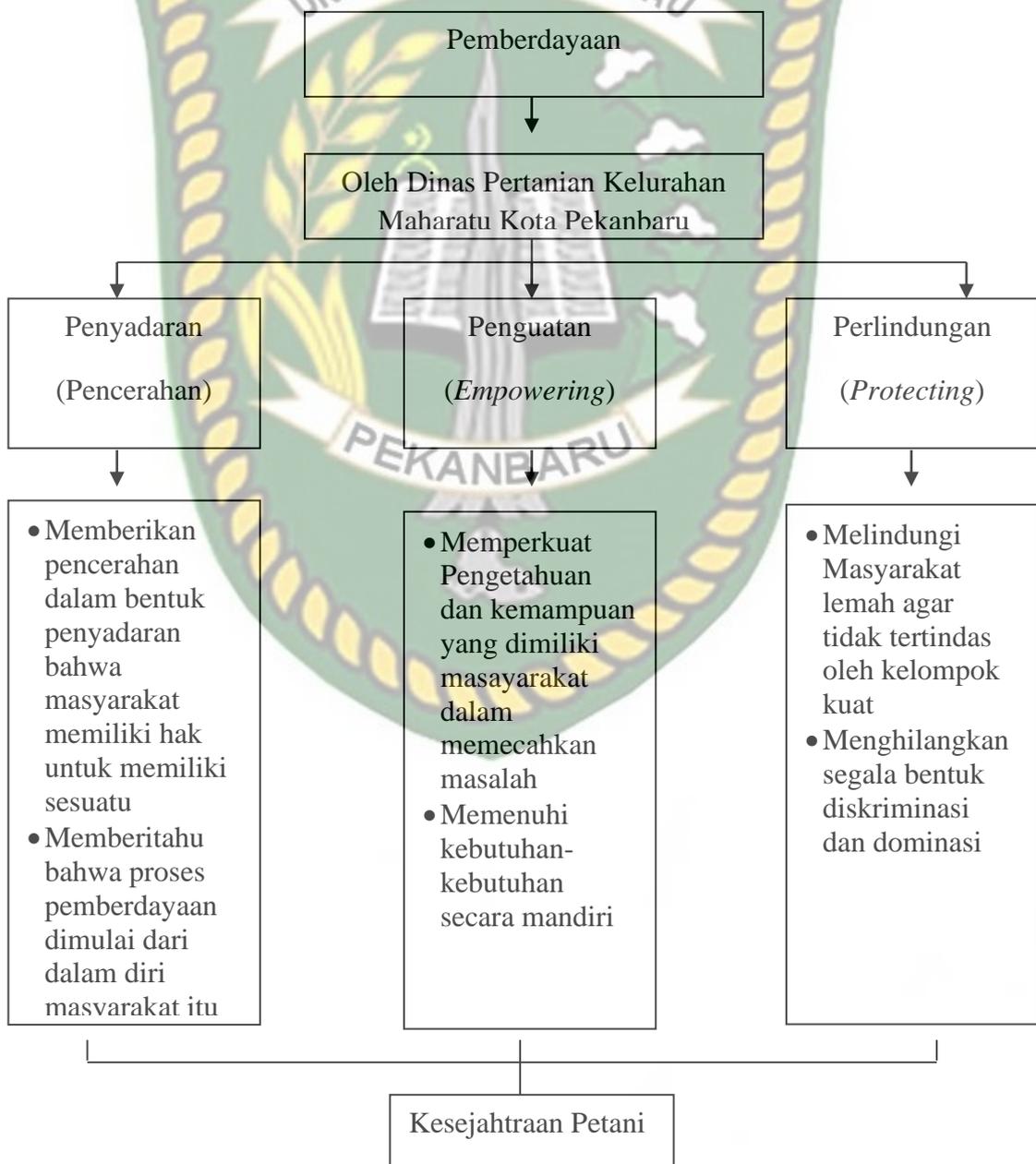
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan ini dengan penelitian yang telah lalu.

No	Nama peneliti/tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	1	2	3	4
1	Ayu Purnami Wulandari (2014)	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga	Sama-sama mengkaji mengenai peranan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Penelitian terdahulu mengkaji Pemberdayaan melalui pembuatan sapu gelagah sedangkan yang sekarang pemberdayaan oleh pemerintah
2	Endang Sri Rahayu (2010)	Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Program Pekarangan Terpadu Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul	Sama sama meneliti tentang pemberdayaan petani	Peneliti Terdahulu meneliti pemberdayaan petani hanya dalam ruang lingkup pekarangan , sedangkan yang sekarang meneliti dengan luasan lahan 1ha-2ha lebih.
3	Hikatul Fauziah (2015)	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Agribisnis Desa Medang Kabupaten Lamongan	Sama-sama meneliti tentang peran pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan Terhadap Petani	Peneliti terdahulu hanya meneliti pemberdayaan petani Agribisnis
4	Ravik Karsidi (2002)	Pemberdayaan Masyarakat petani dan Nelayan Kecil	Sama sama berfokus pada pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah	Peneliti terdahulu tidak hanya meneliti kelompok tani, tetapi mencakup kelompok nelayan

C. Kerangka Pikiran

Dalam kerangka pikiran ini penulis menggunakan Teori Pemberdayaan menurut Ginanjar Kartasmita (1996:159-160) Menyebutkan tiga aspek pokok yang perlu dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Pemberdayaan Masyarakat Petani Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus, Kelurahan Maharatu oleh Dinas Pertanian)



D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Lurah di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Sedangkan perangkat kelurahan terdiri dari sekretarik Kelurahan dan kepala- kepala lingkungan yang dalam susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dalam peraturan daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (C.S.T. Kansil,2002:12).
2. Pemerintah kelurahan merupakan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga dapat mewujudkan jati diri, harkat martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri, baik bidang ekonomi, social, agama dan budaya.
4. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.
5. Pemberdayaan petani adalah adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan

sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

6. Pendampingan penyuluh adalah serangkaian kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh penyuluh dalam proses pembelajaran petani melalui penerapan berbagai metode penyuluhan, diantaranya, kursus tani desa, rebug tani desa, farmers field day, dll.



E. Operasional Variabel

Table II.2 : Operasional Variabel Pemberdayaan Masyarakat Petani Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus, Kelurahan Maharau oleh Dinas Pertanian)

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Pemberdayaan adalah upaya Memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu dengan hanya kemampuan sendiri melepaskan dari kemiskinan dan keterbelakangan. (Ginanjari Kartasasmita, 1995:84)	Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Lurah di Kelurahan Maharatu	1. Pengembangan Potensi	a. Memberikan pencerahan dalam bentuk penyadaran bahwa masyarakat memiliki hak untuk memiliki sesuatu. b. memberitahu bahwa proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri masyarakat itu sendiri
		2. Penguatan	a. memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat Petani dalam memecahkan masalah b. memenuhi kebutuhan secara mandiri
		3. Perlindungan	a. melindungi masyarakat Lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat b. menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah survei deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2011;52), metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Sementara penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong (2013;6).

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana subjek penelitian ini berada yang kemudian yang kemudian dijadikan sumber data yang akan digunakan sebagai tempat penelitian. Penulis akan melakukan penelitian di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru karena di Kelurahan Maharatu masih terdapat banyak petani yang sebagian besar atau mayoritas menanam sayur, sedangkan setiap

tahun lahan yang digunakan semakin berkurang sehingga berdampak kepada petani sayur.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipancing oleh pihak peneliti. Istilah ‘informan’ ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. (Arikunto, 2006;145). Adapun sebagai informan yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan berjumlah sebanyak 4 orang, seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.1 Informan dan Key Informan Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Lurah di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan/profesi	Jumlah	keterangan
1	Rina Fitri, S.P	57	S1	Kepala BPP Tampan	1	Key Informan
2	Joko Arif Santoso S.STP, M.Si	29	S2	Lurah	1	Informan
3	Mahoni.,S.P	39	S1	PPL. Maharatu	1	Informan
4	Karno	37	SMP	Bendahara Kelompok Tani	1	Informan
5	Ulfah	52	D3	Petani	1	Informan
6	Herson	40	SMP	Petani	1	Informan
7	Samsur	49	SD	Petani	1	Informan
8	Suprih	42	SD	Petani	1	Informan
9	Ridwan	37	SMA	Petani	1	Informan
	Jumlah				9	

Dayman dan Holloway menyatakan bahwa *key* informan adalah wakil kelompok yang diteliti belum cukup lama kebudayaan, hingga memiliki pengetahuan setingkat menyangkut aturan-aturan, dan bahasa kebudayaan

tersebut. Dengan demikian, *key informan* adalah orang dianggap dan mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang bertanggung jawab besar dalam jalannya proses produksi di lapangan sehingga *key informan* haruslah memiliki kapabilitas dan kemampuan dalam berbagi informasi kepada penulis untuk memberikan informasi yang terkait. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Lurah langsung dengan permasalahan yang diteliti supaya informasi yang di dapatkan benar- benar *real* dan *valid*.

D. Jenis dan Sumber data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan jalan menyebarkan kusioner dan yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Lurah di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa data yang sudah diolah di peroleh dari kantor BPP Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mendukung terhadap penelitian yang meliputi:

a. Data Jumlah kelompok tani

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap informan, yaitu mendapatkan data yang berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Lurah di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

2. Wawancara

Suatu cara mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan wawancara responden secara langsung di tempat penelitian mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Subana (*dalam* Riduan, 2005) wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung sumbernya untuk mendapatkan hasil yang akurat.

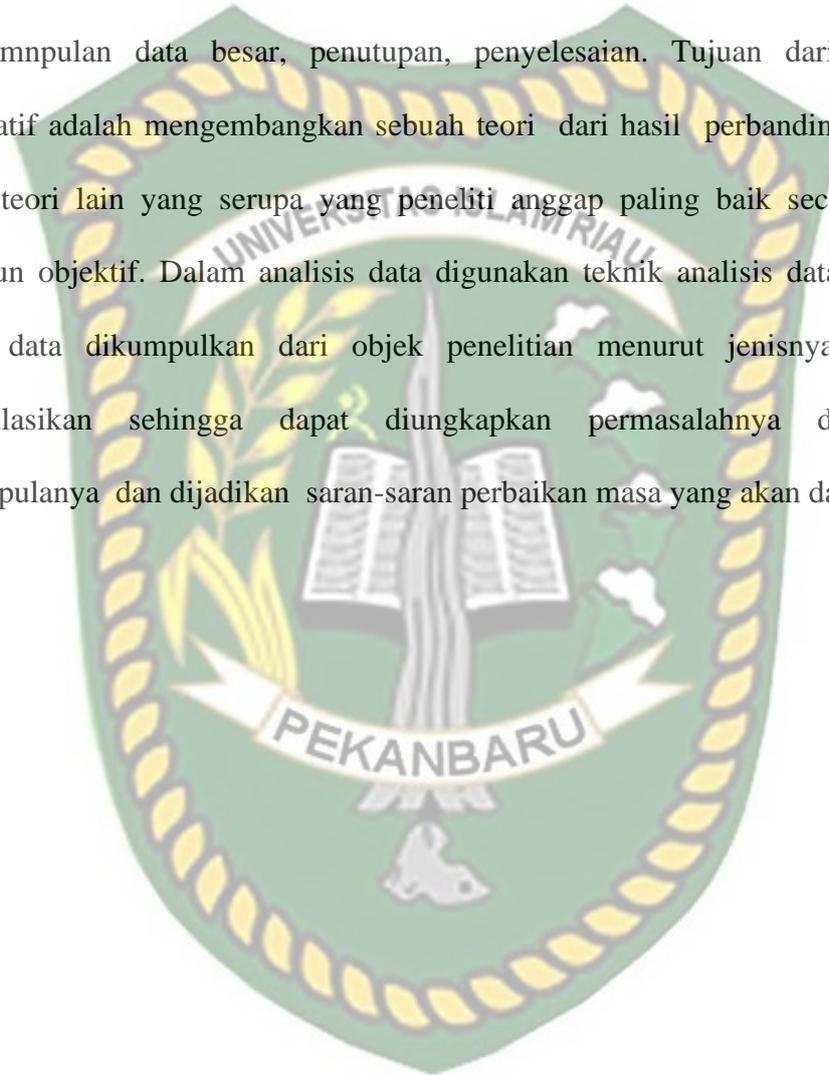
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan / tulisan, wasiat, buku, undang-undangan dan sebagainya. Dokumentasi adalah metode yang digunakan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif pengumpulan dan analisa data dalam bentuk kualitatif adalah proses yang interaktif. Proses ini tidak disebut sebagai prosedur atau teknik tetapi lebih merupakan sebuah

strategi analisis, karena proses ini bersifat fleksibel dan tergantung pada strategi pada pendahulu dan data yang di peroleh dari strategi tersebut (Efenddy, 2009) Mcmilan dan Schumder (2001 dalam Efenddy) berpendapat bahwa pengumpulan data dibagi menjadi perencanaan, memulai pengumpulan data, pengumpulan data besar, penutupan, penyelesaian. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah mengembangkan sebuah teori dari hasil perbandingan dengan Teori-teori lain yang serupa yang peneliti anggap paling baik secara objektif maupun objektif. Dalam analisis data digunakan teknik analisis data deskriptif. yaitu data dikumpulkan dari objek penelitian menurut jenisnya kemudian ditabulasikan sehingga dapat diungkapkan permasalahnya dan ditarik kesimpulanya dan dijadikan saran-saran perbaikan masa yang akan datang.



G. Jadwal waktu kegiatan Penelitian

Table III. 2. Jadwal waktu dan kegiatan penelitian

No	Jenis kegiatan	Bulan/Minggu 2021																			
		Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan proposal																				
2	Seminar proposal																				
3	Perbaikan proposal																				
4	Survey lapangan																				
5	Analisa data																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Perbaikan Bab Per Bab																				
8	Ujian Skripsi																				
9	Perbaikan skripsi																				
10	Penggandaan skripsi																				

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai

Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru merupakan pemekaran dari kelurahan induk yaitu sebagian dari kelurahan simpang tiga Kecamatan Bukit Raya dan Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan, Berdasarkan peraturan Daerah No.3 Tahun 2003 dan No.4 Tahun 2004.

Pada Tahun 2016 berdasarkan peraturan Daerah No.4 Tahun 2016 Kelurahan Maharatu terbagi 2 menjadi kelurahan Maharatu dan Kelurahan Perhentian Marpoyan.

Kantor Lurah Maharatu diresmikan pada tanggal 23 Desember 2004 dan merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai dengan luas wilayah 2.330 km² dan bertopografi daratan berbatas dengan beberapa kelurahan, yaitu :

1. Sebelah Timur : Kelurahan Air Dingin
2. Sebelah Barat : Kelurahan Sidomulyo Timur
3. Sebelah Utara : Kelurahan Sidomulyo Timur
4. Sebelah Selatan : Kelurahan Perhentian Marpoyan

Kelurahan Maharatu Terdapat 10 RW dan 39 RT, Luas Wilayah 2.330 km² dengan jumlah penduduk 11.438 jiwa, laki-laki sebanyak 5.167 jiwa dan perempuan sebanyak 6.279 jiwa.

Suhu rata-rata di Kelurahan Maharatu Maksimum berkisar 32,4 C-34,7 c, dan suhu minimum berkisar antara 23,5 C-24,2 C dan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 72% sampai 84%.

Curah hujan tertinggi pada bulan Desember yakni, 641,1 mm dan curah hujan terendah pada bulan juni yakni 56,1 mm. jenis tanah di Kelurahan Maharatu berjenis gromoksol, cocok digunakan untuk lahan pertanian, bahkan dengan curah hujan yang cukup dapat dimanfaatkan masyarakat Kelurahan Maharatu bertopografi di dataran dan berada pada ketinggian 5-50 m dari permukaan laut.

1. Visi, Misi dan Motto Kelurahan Maharatu

a. Visi

Terdepan dalam bidang agrobisnis, Prima dalam Pelayanan

b. Misi

1. Menciptakan Iklim usaha yang sehat di bidang agrobisnis dan mengembangkan ekonomi kerakyatan
2. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
3. Meningkatkan kinerja dan kualitas aparatur kelurahan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kelurahan Maharatu

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Precentage
1	Laki-Laki	5.167	48%
2	Perempuan	6.279	52%
	Jumlah	11.438	100%

Sumber Data : Kantor Kelurahan Maharatu, 2021

Dari tabel di atas terlihat jumlah penduduk yang ada di kelurahan Maharatu tahun 2020 adalah 11.438 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 5.167 jiwa dan perempuan berjumlah 6.279 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan cukup berbeda dengan selisih 1.112 jiwa. Hal ini

dikarenakan setiap tahun terjadi pertumbuhan penduduk sehingga jumlah penduduk di Kelurahan Maharatu semakin bertambah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kelurahan Maharatu Marpoyan Damai kota Pekanbaru, kemudian dikemukakan tentang pokok pembahasan penelitian ini yaitu yang berjudul

Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus, Kelurahan Maharatu Oleh Dinas Pertanian).

Dalam bab ini juga akan diuraikan berbagai aspek antara lain, identitas responden yang mana akan digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden. Kemudian deskripsi tentang hasil kuisioner yang telah disebarkan pada responden yang dilanjutkan dengan analisis data yang sudah di dapat dan di peroleh dari hasil turun ke lapangan atau lokasi penelitian secara langsung dan bertemu dengan semua responden.

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan mudah dipahami, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat pada bagian yang tersusun dalam bab V dibawah ini :

A. Identitas Responden

Identitas responden pada penelitian ini adalah berjumlah 9 orang, yang mana akan di kelompokkan dan disusun menjadi jenis kelamin, kelompok umur dan tingkat pendidikan yang bertujuan untuk mendiskripsikan keadaan responden pada penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan identitas responden tersebut untuk memberikan gambaran tentang responden, maka disajikanlah identitas responden tersebut sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin di sini ialah untuk menggambarkan banyaknya responden yang berjenis laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelas identitas responden yang berasal dari sumber yang sebagai responden di Kelurahan Maharatu Kecamatan

Marpoyan Damai adalah berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel V.1 dibawah ini:

Tabel 5.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	7	75 %
2	Perempuan	2	25 %
Jumlah		9	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

2. Kelompok Umur

Kelompok umur disini ialah penulis akan mengelompokan umur responden dengan cara tingkatan gambaran dari umur responden penelitian. Kemudian akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan kelompok umur, maka tabel mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel V.2 dibawah ini :

Tabel 5.2 Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1.	20 – 30	1	11 %
2.	31 – 40	4	44 %
3.	41 – 50	2	22 %
4.	51 Tahun Keatas	2	22 %
Jumlah		9	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel 5.2 di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang paling dominan adalah berumur 31-40 tahun yakni 4 orang atau 60 %, dan di ikuti oleh umur diantara 41-50 tahun yaitu sebanyak 2 orang atau 15%, selanjutnya untuk umur 51 tahun keatas atau sebanyak 2 orang atau sekitar 15 %, kemudian paling sedikit umur 20 – 30 sebanyak 1 orang atau sama dengan 10 %. Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang

dimintai pendapatnya berada pada kategori umur yang produktif dalam pengumpulan data responden.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan disini menggambarkan identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang di tempuh. Kemudian dalam identitas responden yang berada pada kusioner ini adalah mengenai informasi pengelompokan pendidikan yang dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini :

Tabel 5.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	2	22 %
2.	SMP	2	22 %
3.	SMA	1	11 %
4.	Diploma	1	11 %
5.	Strata Satu (S1)	2	22 %
6.	Strata Dua (S2)	1	11 %
	Jumlah	9	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari tabel 5.3 diatas dapat dilihat bagaimana tingkat pendidikan dari responden, dimana terlihat pendidikan dari responden adalah Strata Dua (S2) yang berjumlah 1 orang dengan 11%, dan tamatan Strata Satu (S1) sebanyak 2 orang atau sama dengan 22%, tamatan SMA sebanyak 1 orang dengan 11%, Tamatan SMP sebanyak 2 orang dengan 22% dan disusul dengan tamatan SD sebanyak 2 orang dengan 22%, Jadi dari data tersebut dapat dilihat latar pendidikan responden dalam penelitian ini yang lebih banyak adalah yang tamatan Strata Satu (S1) dan sudah mendekati kategori cukup, sehingga jawaban yang diberikan juga lebih baik.

B. Hasil Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus, Kelurahan Maharatu Oleh Dinas Pertanian).

Pada dasarnya, proses pemberdayaan merupakan salah satu siklus atau proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun nonformal untuk melakukan proses kajian masalah merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah direncanakan bersama dalam mencapai sebuah tujuan. Untuk melihat bagaimana proses pemberdayaan masyarakat petani sayur oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, maka penulis melakukan penelitian dan observasi lapangan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Penyadaran

Penyadaran merupakan penyadaran dengan target, yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka punya hak untuk mempunyai sesuatu. Perinsipnya, membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka. Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007:2)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPP Tampan, Lurah Kelurahan Maharatu, PPL Maharatu, Kelompok Tani Kelurahan Maharatu yang di dasarkan pada indikator penyadaran di dapati bahwa responden memberikan pernyataan atau komentar diantaranya oleh Bapak Joko Arif Santoso S.STP., M.Si bahwa:

“ penyadaran pernah dilakukan kepada kelompok tani dalam bentuk Sekolah Langsung serta mengirim petani untuk studi banding kedaerah lain agar meningkatkan pengetahuan petani. (15 Oktober 2021 Pukul 10:30 WIB)”

Penyadaran yang diberikan kepada petani sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri, menggali potensi diri serta meningkatkan

pengetahuan Petani. Ini juga didukung dengan ungkapan bapak Mahoni., S.P selaku PPL Maharatu yang mengatakan:

“penyadaran yang diberikan kepada petani dalam bentuk pembinaan kelembagaan kelompok tani, pelatihan-pelatihan atau sosialisasi serta pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian. (16 Oktober 2021 Pukul 09:30 WIB)”

Kepala BPP Tampan, Ibuk Rina Fitri ., S.P menyampaikan:

“dalam meningkatkan potensi para petani, BPP Tampan telah melakukan berbagai kegiatan pertanian serta bantuan dalam bentuk fisik, sarana prasarana pertanian serta memberikan pelatihan kepada petani. 18 Oktober 2021 Pukul 14:00 WIB)”

Dalam proses penyadaran yang dilakukan terdapat faktor yang menghambat untuk meningkatkan kreatifitas dari kelompok tani. Hal ini di ungkapkan oleh bapak Mahoni S.P yang mengatakan:

“kurangnya kesadaran petani dalam partisipasi dalam kegiatan usaha tani, kondisi lapangan yang tergantung kondisi alam, masih rendahnya pengetahuan petani terhadap penerapan teknologi pertanian serta anggaran yang terbatas untuk melakukan kegiatan”

Hasil wawancara dari bapak Karno selaku Bendahara Kelompok Tani yaitu:

“kalau sosialisasi pernah diberikan dari dinas Provinsi dan kabupaten dalam bentuk penyuluhan, namun sejauh ini belum ada penyelesaian dari permasalahan yang ada seperti banjir yang merendam kebun kami, dan ketika ada serangan hama, juga belum ada penyelesaian dari dinas. 20 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB)”

Senada dengan pernyataan Bapak Karno selaku Bendahara Kelompok Tani, dalam wawancara dengan Bapak Samsur beliau menyatakan:

“Penyuluhan dilakukan sebulan sekali di BPP untuk ketua kelompok Tani saja, sejauh ini untuk meningkatkan potensi dari petani dilakukan secara alami saja. 20 Oktober 2021 Pukul 11.30 WIB”

Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti penyadaran yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai masih minim

seperti sosialisasi. Maka hasil penelitian memperlihatkan penanggung jawab pelaksanaan program di daerah dinilai masih lemah dalam melakukan penyadaran kepada petani kelurahan Maharatu.

2. Penguatan (*Empowering*)

Penguatan (*empowering*) yakni memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. (Kartasmita 1995:84).

Penguatan sangatlah diperlukan dalam proses pemberdayaan petani, penguatan bias dilakukan dengan inovasi yang dibutuhkan petani, seperti memperkuat pengetahuan dan kemampuan petani, bantuan alat mesin pertanian, bantuan bibit-bibit unggul pertanian, bantuan obat pembasmi hama dan lainnya yang akan menunjang potensi dan kemandirian petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPP Tampan, Lurah Kelurahan Maharatu, PPL Maharatu, Kelompok Tani Kelurahan Maharatu yang di dasarkan pada indikator penyadaran di dapati bahwa responden memberikan penguatan atau komentar diantaranya oleh Bapak Joko Arif Santoso S.STP., M.Si bahwa:

“untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan petani sayur yaitu dengan melakukan pelatihan, dan Studi banding. Untuk kebutuhan petani sayur agar menjadi lebih mandiri diberikan bantuan bibit,pestisida dan lain-lain.”

Senada dengan ungkapan di atas untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan dari kelompok tani, ibuk Rina Fitri., S.P Kepala BPP Tampan dalam wawancara menyebutkan:

“untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat petani sayur dalam memecahkan masalahnya dilakukan penyuluhan dan bimbingan kepada petani sayur, pemberian pupuk serta pestisida, factor penghambat dari penguatan kelompok tani ini ialah masih kurangnya tenaga penyuluh yang ditempatkan keseluruh kecamatan dan desa.”

Dalam wawancara dengan Bapak Karno selaku Bendahara Kelompok Tani menyebutkan:

“yang menjadi hambatan dalam penguatan petani yaitu anggaran yang terlalu rendah untuk pengadaan dan kegiatan yang akan disalurkan ke petani, serta tidak semua petani yang menerima bantuan pupuk dan lain-lain sesuai yang telah mengikuti anjuran dan yang membutuhkan oleh penyuluhan pertanian.”

Wawancara dengan bapak Mahoni.,S.P selaku PPL Maharatu menyebutkan:

“masih rendahnya pengetahuan petani terhadap penerapan teknologi pertanian, dan dalam waktu bersamaan para petani bentrok dengan pekerjaan lain serta kendala banjir yang merendam lahan pertanian.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak suprih selaku Petani, mengatakan:

“pernah ada studi banding Cuma itu yang di tunjuk oleh penyuluh nya saja, kalau kami tidak pernah merasakan dan juga yang berangkat itu tidak menceritakan apa saja yang di dapat dari studi banding. Kalaupun ada penyuluhan dari dinas kami hanya di suruh kumpul saja, bantuan ada seperti pupuk dan pestisida, untuk pupuk juga bukan pupuk yang biasa kami gunakan sebelumnya.”

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan masih banyaknya bantuan yang diberikan oleh dinas belum didapat oleh petani, maka penguatan di kelurahan maharatu masih dibilang lemah, dari hasil wawancara petani sayur belum merata dan belum tepat sasaran bantuan kepada petani yang dilakukan oleh Dinas Pertanian.

Penguatan kepada petani di kelurahan Maharatu sangatlah penting untuk meningkatkan hasil produksi petani serta juga dalam meningkatkan

kesejahteraan petani, maka dari itu diperlukan peningkatan penguatan kepada petani di kelurahan maharatu kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi yang di dapati peneliti dilapangan berkaitan dengan penguatan yang diberikan oleh dinas seperti bibit, pupuk dan pestisida masih terbatas dan belum efektif diberikan kepada petani. Mengenai adanya banjir di lahan pertanian yang membuat tidak bagus nya kualitas sayur yang di hasilkan, menurut hemat peneliti sebaiknya Dinas membuat tanggul atau saluran air sehingga jika hujan deras, air tidak merendam lahan pertanian masyarakat petani sayur. Maka dari itu Dinas haruslah melihat secara langsung kelapangan serta bermusyawarah seperti apa yang dibutuhkan petani. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan penguatan yang dilakukan oleh Dinas masih lemah, maka dari itu Dinas selaku Pemerintah Daerah haruslah memperhatikan kembali bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat serta melakukan pengawasan untuk hasil produksi sayur milik petani Kelurahan Maharatu.

3. Perlindungan

Perlindungan (*Protecting*) harus melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan yang lemah, oleh karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. (Kartasmita 1995:84)

Perlindungan dan pemihakan yang lemah, melindungi tidak berarti mengisolasi dan menutupi dari berinteraksi karena hal itu bukan akan memperkuat tetapi justru melemahkan. Melindungi harus dilihat dari sebagai upaya untuk

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPP Tampan, Lurah Kelurahan Maharatu, PPL Maharatu, Kelompok Tani Kelurahan Maharatu yang di dasarkan pada indikator perlindungan di dapati bahwa responden memberikan penguatan atau komentar diantaranya oleh Ibuk Rina Fitri.,S.P., M.Si bahwa:

“Perlindungan telah diberikan kepada petani melalui asuransi usaha tanaman sayur kualitas hasil pertanian juga sudh bagus karena banyaknya bantuan, dll serta melalui upaya dengan pemupukan, dan pestisida untuk pengendalian hama.”

Perlindungan sangat diperlukan oleh petani itu merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani sayur, upaya yang dilakukan Dinas Pertanian dalam bentuk perlindungan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh petani itu sendiri melalui musyawarah bersama, sesuai dengan pernyataan di atas berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden yaitu Bapak Joko Arif Santoso., S.STP selaku Lurah yang mengatakan :

“perlindungan kepada petani melalui bidang Prasarana dan sarana, serta penyuluh dalam bentuk asuransi pertanian.”

Wawancara dengan bapak Mahoni.,S.P selaku PPL Maharatu menyebutkan:

“perlindungan kepada petani diberikan berupa upaya pengendalian hama dan penyakit akan dicarikan solusi bersama, dalam kondisi darurat dan akan dibantu segi fisik/racun dibawah ambang batas ekonomi.”

Namun pernyataan diatas bertentangan dengan yang disampaikan oleh

bapak ridwan selaku Petani yang mengatakan :

“pernah dulu kena serang hama tapi tidak adanya solusi dari pihak dinas dan tidak ada asuransi juga, jadi hasil panen sayur menjadi berkurang dari hasil panen sebelumnya, saya selama bertani hanya modal sendiri tidak pernah merasakan bantuan modal usaha tani atau penyelesaian

permasalahan hama dari Dinas Pertanian.(22 Oktober 2021 Pukul 14:00 WIB)”

Senada dengan apa yang disampaikan di atas ibuk Ulfah selaku Petani melalui wawancara beliau mengatakan:

“Tidak mengetahui, Mungkin ada tapi kami tidak mengetahui mengenai program.”

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan petani mengeluhkan seperti, tidak adanya asuransi pertanian ketika petani mengalami kegagalan saat panen, tidak adanya solusi dari dinas serta peminjaman modal kepada pihak swasta dikarenakan tidak adanya peminjaman yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah daerah melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) harus memberikan perlindungan kepada petani untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan petani sayur di kelurahan maharatu Kecamatan Marpoyan Damai. Dari hasil observasi dan wawancara peneliti maka perlindungan kepada petani sayur di kelurahan Maharatu masih terbilang lemah.

Setelah dilakukannya wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan dengan judul peneliti “Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus, Kelurahan Maharatu Oleh Dinas Pertanian)” upaya pemberdayaan petani melalui program peningkatan kesejahteraan petani masih terbilang lemah karena kegiatan-kegiatan dan bantuan dari program peningkatan kesejahteraan petani belum bias dirasakan sepenuhnya oleh petani sayur di Kelurahan Maharatu.

Dan berdasarkan penelitian diatas menurut teori yang ada dikemukakan oleh Ginanjar Kartassamita (Kartasamita 1995:84) dan wrihatnolo dan Dwijiwijoto (2007:2) bahwa pemberdayaan petani sayur di Kelurahan Maharatu sudah dilakukan dengan pendekatan dan ciri pemberdayaan, namun masih terbilang lemah. Karena menurut teori Ginanjar Kartassamita pemberdayaan harus mengikuti tiga upaya besar yaitu Penyadaran, Penguatan dan Perlindungan, serta satu sama lain saling berkaitan yang merupakan tahapan Pemberdayaan Masyarakat. Maka Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur di Kelurahan Maharatu harus berkaitan dengan tiga pokok tahapan tersebut, agar Pemberdayaan petani sayur di Kelurahan Maharatu tepat sasaran pengembangan potensi dan kesejahteraan petani di Kelurahan Maharatu, Karena tiga tahapan tersebut saling berkaitan.

C. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses upaya Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus, Kelurahan Maharatu Oleh Dinas Pertanian).

Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus, Kelurahan Maharatu Oleh Dinas Pertanian) masih terbilang lemah karena disebabkan beberapa faktor penghambat berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti dilapangan dapat dilihat sebagai berikut,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Kelurahan Maharatu yang menyatakan:

“anggaran perencanaan dan pengendalian program peningkatan kesejahteraan masyarakat petani sayur yang ada saat ini dirasa sangat minim untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kelurahan Maharatu.”

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pertanian yang menjadi faktor penghambat terhadap pemberdayaan Petani sayur. Berikut wawancara peneliti dengan bapak Mahoni.,S.P selaku PPL Maharatu yang Mengatakan:

“Harapan kami sebagai Penyuluh diberikan ruang dan pelatihan secara berkesinambungan agar peningkatan skill dan keterampilan tenaga penyuluh untuk memberikan pemahaman kepada petani.”

Berdasarkan Ungkapan diatas Bahwa Balai Penyuluhan Pertanian Kota Pekanbaru masih terbilang lemah dikarenakan sumber daya manusia yaitu tenaga penyuluh yang ada pada Dinas belum memadai dan kurangnya keterampilan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat petani sayur hal I I dikarenakan kurangnya anggaran pelatihan. Hal ini menjadi Faktor penghambat dan tidak mampu meningkatkan skill dan keterampilan tenaga penyuluh dikarenakan faktor kurangnya sumber daya manusia .

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Mahoni.,S.P selaku PPL Maharatu dalam wawancara yang menyampaikan:

“Program Pemerintah rutin disampaikan kepada petani melalui ketua kelompok tani karena terbatasnya anggaran dan waktu. Tetapi menurut hemat saya ada beberapa oknum ketua kelompok tani yang tidak berperan aktif sebagaimana semestinya, Sehingga Dinas dan petani terputus dalam penyampaian Informasi Program.”

Pernyataan diatas diperkuat oleh bapak Samsur selaku petani yang menyatakan:

“Kurang Aktifnya salah satu ketua kelompok tani dalam menyampaikan aspirasi petani sayur di kelurahan Maharatu.”

Dari ungkapan diatas dapat dilihat kurang aktifnya ketua kelompok tani yang menyebabkan tidak berjalannya proses pemberdayaan Petani sayur di Kelurahan Maharatu sehingga terputusnya penyampaian informasi program.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti, maka peneliti berpendapat ada beberapa faktor hambatan-hambatan dalam proses pemberdayaan masyarakat petani di Kelurahan Maharatu, diantaranya:

4. Faktor oknum ketua kelompok tani yang kurang aktif

Kurang berperan salah satu oknum ketua kelompok tani dalam menyampaikan aspirasi masyarakat petani sayur sehingga terputusnya komunikasi antara pemerintah dan petani yang menyebabkan terhambatnya proses pemberdayaan masyarakat petani sayur di kelurahan Maharatu Kota Pekanbaru.

5. Faktor anggaran

Keterbatasan anggaran yang dikeluarkan maka pelaksanaan kegiatan dan bantuan kepada petani menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses pemberdayaan masyarakat petani sayur di kelurahan Maharatu Kota Pekanbaru.

6. Faktor minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya Sumber Daya Manusia sebagai tenaga penyuluh lapangan yang mempengaruhi kurang maksimalnya kinerja Pemerintah. Serta tenaga penyuluh yang ada pada dinas belum memadai dan kurangnya keterampilan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat Petani sayur.



PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah peneliti lakukan dengan judul yaitu “Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus, Kelurahan Maharatu Oleh Dinas Pertanian)” maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakannya saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Dalam upaya Pemberdayaan masyarakat Petani sayur oleh Dinas Pertanian di Kelurahan Maharatu Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas yaitu (1) Penyadaran yang dilakukan masih terbilang lemah karena minimnya petani yang mendapatkan sosialisasi.(2) dalam hal penguatan kepada petani bahwa Dinas Pertanian Kota Pekanbaru belum melakukan penguatan secara optimal ini dilihat dari tidak keseluruhannya petani mendapatkan bantuan dari dinas serta belum tepat sasaran bantuan tersebut. (3) Perlindungan yang diberikan oleh dinas pertanian masih terbilang lemah kepada petani, dikarenakan belum adanya bantuan/jaminan usaha kepada petani (asuransi pertanian).
2. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan hambatan-hambatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur di Kelurahan Maharatu. Yakni, (1)

faktor hambatan dari masyarakat yaitu ketua kelompok tani yang kurang aktif
 (2) Faktor hambatan dari alam (3) faktor anggaran dan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM).

B. Saran

1. Ketua kelompok tani yang tidak aktif disarankan agar aktif kembali melalui penyuluh pertanian mengkoordinasi pengoptimalan kelompok tani dalam hal ini agar aktif dalam menyampaikan informasi, menanyakan program serta mengkoordinir anggota kelompok tani.
2. Disarankan agar tenaga penyuluh dan pendamping pertanian untuk segera ditambah yang sebelumnya dari satu tenaga penyuluh setiap kelurahan menjadi satu tenaga penyuluh setiap kelompok tani dan lebih ditingkatkan lagi kemampuan penyuluh dalam memberikan pendampingan kepada petani.
3. Hendaknya anggaran dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani yang ada digunakan secara tepat pada sasaran karena banyaknya bantuan yang belum didapat oleh petani serta minimnya sosialisasi yang diberikan kepada petani yang menjadi penghambat berjalannya pemberdayaan Masyarakat Petani di Kelurahan Maharatu Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- David R Freend .2017.*manajemen Stratejik*.Jakarta : Bumi Aksara.
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The power of good corporate governance : teori dan implementasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Gunawan, Adi w. 2006 *Re-Program pikiran anda untuk meraih kesuksesan*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
- Islamy, Irfan, 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- J.F Winardi Strategi, 2003 *Enterpreneur & Enterpreneurship*, PT fajar Interpretama Mandiri
- Labolo, Muhadam, 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Kelapa Gading Permai.
- Mardikanto, Totok. 2013. *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Jakarta:Rineka Cipta
- Maulidiah S, 2014. *Admidistrasi Terpadu Kecamatan*. Bandung: Indra Prahasta
- Moleong. Lexy J., 2013 *Metedologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ketigapuluhsatu, Bandung:Remaja Rosadakarya
- Munaf,Yusri, 2016. *Hukum admintrasi Negara*.Universitas Islam Riau
- Mustari, Mustafa. 2014. *Filsafat introduksi kritis*. Jakarta: Alauddin University Press.
- Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurcholis,Hanif ,2011. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Oos,M.Anwas. 2013. *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Jakarta:Alfabeta
- Osborne David dan Peter Plastrik.2001 *Memangkas Birokrasi menuju Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*.Terjemahan Jakarta:PPM
- Rauf,Rahyunir dan Munaf, Yusri.2015.*Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*.Pekanbaru,Zanafa Publishing
- Riduwan. 2005. *Belajar mudah penelitian untuk guru karyawan dan peneliti muda*. Jakarta: Alfabeta
- S.T Kansil, Christine 2002. *Kitab undang-undang hukum perusahaan Jilid 3*. Jakarta: Pradny Paramita
- Siagian, Sondang P ,200. *Menajemen SDM*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P ,2005. *Admintrasi Pembangunan*. Jakarta masagung

- Soekanto , Soerjono, 2006 . sosiologi suatu pengantar. PT Grafindo Persada
- Soerharto Edi, 2006. *Membangun masyarakat Memberdayakan*. Jakarta: PT. Refika Aditama
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, Edy, 2004. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur penelitian: pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syafiie, Inu kencana. 2003 *Pengantar ilmu pemerintahan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Syafiie, Inu kencana. 2003 *Sistem administrasi Negara*, PT. Bumi Aksara
- Thoha ,Fiftah .2002. *Pembinaan Organisasi* .Jakarta , PT Raja Granfindo Persada
- Widjaja. 2002. *Pedoman pelaksanaan pendidikan pancasila pada perguruan tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

DOKUMEN

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Undang –Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

JURNAL DAN PENELITIAN TERDAHULU

Ayu Purnami W (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*

Endang Sri R (2010). *Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Program Pekarangan Terpadu Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul*

Dwi A, Susi E, Evy M. (2012). *Analisis Perilaku Petani Sayur di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*

